
PEMBINGKAIAN ISU PELANGGARAN HAM DI PAPUA OLEH MEDIA INTERNASIONAL

Meylinda Wamafma, Sonny Sudiar

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberitaan media internasional membingkai isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dan bagaimana framing tersebut memengaruhi pendapat atau membentuk opini masyarakat internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis framing terhadap berbagai pemberitaan dari media internasional seperti; BBC, Reuters, The Guardian, Al Jazeera, dan Association Press. Data pemberitaan di kombinasikan dengan laporan Lembaga HAM internasional serta respons diplomatik negara-negara terkait untuk melihat hubungan antara konstruksi media dan persepsi publik global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media internasional secara konsisten menyoroti kekerasan aparat, pembatasan kebebasan pers, serta diskriminasi struktur di Papua, sehingga menghasilkan framing yang cenderung kritis terhadap pemerintah Indonesia. Framing ini memengaruhi pembentukan opini internasional, yang pada akhirnya mendorong perhatian global, tekanan normatif, serta respons diplomatik dari sejumlah aktor internasional, termasuk PBB dan negara-negara Melanesia atau Pasifik. Temuan ini menegaskan bahwa pemberitaan media internasional tidak hanya membentuk persepsi publik global, tetapi juga berkontribusi pada dinamika politik luar negeri dan reputasi internasional Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan transparansi informasi, penguatan mekanisme HAM, serta strategi komunikasi publik yang lebih efektif untuk mengurangi kesenjangan narasi antara pemerintah dan komunitas internasional.

Kata kunci: Pembingkaihan isu Ham, Opini Publik Internasional, Pelanggaran Ham, Diplomasi.

Abstract

This study aims to analyze how international media frames human rights violations in Papua and how this framing influences international community opinions. This study uses a qualitative approach with framing analysis of reports from the BBC, Reuters, The Guardian, Al Jazeera, and the Associated Press. News data is combined with reports from international human rights organizations and diplomatic responses of relevant countries to examine the relationship between media construction and global public perception. Results show international media consistently highlights violence by authorities, restrictions on press freedom, and structural discrimination in Papua, resulting in framing critical of the Indonesian government. This framing influences international opinion, drives global attention, normative pressure, and diplomatic responses from actors including the United Nations and Melanesian or Pacific countries. The study recommends increased information transparency, strengthened human rights mechanisms, and more effective public communication strategies to reduce the narrative gap between the government and the international community

Keywords: Framing of Human Right Issues, Internasional Public Opinion, Human Right, Violations, Diplomacy.

1. PENDAHULUAN

Secara empiris, masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua telah menjadi perhatian global sejak tahun 2000-an. Pola kekerasan yang melibatkan TNI/Polri, Kelompok Kriminal Bersenjata/TPNPB-OPM, dan warga sipil paling banyak terpengaruh dalam peristiwa seperti Wasior 2001, Wamena 2003, Paniai 2014, Nduga 2018–sekarang, dan kasus mutilasi Nduga 2023 dan pembunuhan Tobias Silak 2024 (Mampioper, 2025).

Dalam hal media, karena jurnalis asing tidak dapat masuk ke Papua, liputan internasional bergantung pada aktivis diaspora, Amnesty International, dan Human Rights Watch (Independen, 2018). Media terkemuka di seluruh dunia, seperti BBC, Reuters, The Guardian, Al Jazeera, (Doherty, 2019). dan The New York Times, (Paddock, 2019). secara teratur menceritakan tentang kekerasan aparat, diskriminasi struktural, dan pembatasan kebebasan pers di Papua (Darmawan, 2019). Di forum-forum seperti Parlemen Eropa, PBB, dan negara-negara Pasifik seperti Vanuatu, perspektif ini kemudian menjadi norma OHCHR, 2002; (Lantang, 2021).

Fenomena ini menunjukkan bahwa ada perbedaan narasi: narasi pemerintah terkait keamanan dan pembangunan kurang terekspos, sementara narasi media internasional lebih kritis terhadap negara.

Secara Normatif, Sebagai negara demokrasi konstitusional, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik, sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di tingkat internasional, prinsip Responsibility to Protect dan mekanisme Dewan HAM PBB menuntut negara untuk menunjukkan transparansi dalam tanggapannya terhadap dugaan pelanggaran.

Media membentuk identitas, kepentingan, dan legitimasi negara, menurut konstruktivisme hubungan internasional akademis (Wendt. A, 1992). Menurut teori framing Robert N. Entman, media memilih dan menonjolkan bagian realitas tertentu, yang berdampak pada interpretasi public (Entman, 1993). Namun, Model Propaganda Herman dan Chomsky menunjukkan bahwa media Barat sering menghasilkan cerita tentang "musuh bersama" dengan menggunakan ideologi dan filter flak. (Naom Chomsky, 2002).

Oleh karena itu, penelitian empiris diperlukan untuk memahami bagaimana media internasional mengonstruksi masalah HAM Papua karena konstruksi tersebut memengaruhi opini publik di seluruh dunia dan diplomasi Indonesia.

Kajian Pustaka. Media Framing, Entman menekankan bahwa framing bekerja dengan memilih masalah dan menonjolkan aspek tertentu. Eriyanto menyatakan bahwa dalam konteks konflik, media melakukan "pengecilan realitas" untuk mengalihkan perhatian publik. Teori model ini secara sederhana dapat dipahami bahwa media dapat melakukan pengecilan suatu realitas agar dapat mengalihkan pusat perhatian pembaca atau masyarakat kepada realitas yang mereka tonjolkan (Kurnia, 2021). Karena suatu peristiwa atau masalah akan lebih mudah diingat jika ada unsur-unsur yang menonjol, seperti banyaknya, bentuk yang berbeda, atau bahkan ringkasan dengan nilai-nilai masyarakat yang jelas (PERMITA, 2024).

Teori Konstruktivisme, menurut Wendt dan Finnemore & Sikkink menyatakan bahwa identitas dan norma dibentuk lewat interaksi sosial. Media menjadi medium penting dalam proses tersebut. Konstruktivis pada dasarnya adalah menekankan peran struktur non material (normatif dan ideasional) terhadap identitas dan kepentingan, namun struktur ini tidak akan terbentuk ketika tidak di aplikasikan ke dalam bentuk nyata seperti tindakan (Sudiar & Hidayat, 2019). Secara ontologis, konstruktivisme dibangun atas tiga proposisi utama. Pertama, struktur sebagai pembentuk perilaku aktor sosial dan politik, baik individual maupun negara, konstruktivis berargumen bahwa sistem nilai, keyakinan dan gagasan bersama (normatif) sebenarnya juga memiliki karakteristik struktural dan menentukan tindakan sosial maupun politik. Kedua, kepentingan (sebagai dasar bagi tindakan atau perilaku politik) bukan menggambarkan rangkaian preferensi yang baku, yang telah dimiliki oleh aktor-aktor politik, melainkan sebagai produk dari identitas aktor-aktor tersebut. Teoretisi konstruktivisme lebih menekankan pada sumber-sumber munculnya kepentingan, yakni bagaimana aktor-aktor politik mengembangkan kepentingan-kepentingan mereka. Ketiga struktur dan agent saling menentukan satu sama lain.

Kemudian Chomsky menemukan lima filter media dalam hal propaganda. Chomsky mengidentifikasi lima filter yang membentuk berita yang diterima publik dan memastikan bahwa informasi disesuaikan dengan kepentingan elit:

1. Ukuran, kepemilikan terkonsentrasi, kekayaan pemilik, dan orientasi keuntungan.

Konglomerat yang berfokus pada keuntungan sering memiliki media besar. (*the size,*

concentrated ownership, owner wealth, and profit orientation of the dominant mass-media firms;)

2. Advertising as the Main Income Source: Liputan berita dipengaruhi oleh ketergantungan media pada pendapatan iklan. (*advertising as the primary income source of the mass media;*)
3. Media bergantung pada informasi yang diberikan oleh pemerintah, bisnis, dan "ahli". (*thereliance of the media on information provided by government, business and "experts" funded and approved by these primary sources and agents of power;*)
4. Kritik atau "flak" sebagai cara mendisiplinkan media: Kritik digunakan sebagai cara mendisiplinkan media. (*"flak" as a means of disciplining the media;*)
5. Anti communism juga dikenal sebagai "Mekanisme Kontrol Ideologis" adalah ideologi dominan, seperti antikominisme, berfungsi sebagai mekanisme kontrol ideologis. (*"anticommunism" as a national religion and control mechanism*).

Berdasarkan kelima Filter Propaganda tersebut maka dapat dijelaskan bahwa isu pelanggaran ham di Papua yang dibingkai oleh media internasional dapat dikategorikan dalam beberapa filter. Filter ke empat yaitu Flak "*flak" as a means of disciplining the media"* ada sebuah dorongan pada media asing yang sering hiperbola isu Papua, dorongan ini bisa berasal dari LSM Internasional, Jaringan Advokasi maupun negara-negara tertentu. Kemudian ideologi atau "Mekanisme Kontrol Ideologis" yang dapat digunakan untuk menjelaskan hiperbola media asing terhadap Papua.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana media internasional membingkai isu pelanggaran HAM di Papua, dan bagaimana framing tersebut memengaruhi opini publik internasional serta respons diplomatik?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **Kualitatif** dengan paradigma Konstruktivisme. Fokus utamanya adalah pada analisis teks media. (Sugiyono, Sugiyono, 2021). **Objek kajian** meliputi berita dari berbagai media internasional terkemuka seperti BBC, Reuters, The Guardian, Al Jazeera, dan Associated Press. **Fokus penelitian**, untuk mengkaji tentang bagaimana media internasional mengonstruksi narasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

3. PEMBAHASAN

1. Konteks Pelanggaran HAM di Papua 2001–2025

Menurut penelitian ini, selama beberapa dekade, pelanggaran HAM di Papua telah menjadi narasi global yang kompleks. Pembatasan kebebasan pers, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan diskriminasi struktural terhadap masyarakat adat Papua adalah salah satu pelanggaran yang disorot. Secara kronologis, rentetan peristiwa kekerasan melibatkan tiga aktor: aparat TNI/Polri, Kelompok Kriminal Bersenjata/TPNPB-OPM, dan warga sipil. Salah satu peristiwa penting yang menarik perhatian media global adalah Wasior 2001, Wamena 2003, Paniai 2014, eskalasi Nduga sejak 2018, insiden rasisme Surabaya 2019, pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani 2020, mutilasi Nduga dan serangan Maybrat 2023, dan pembunuhan Tobias Silak 2024.

Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua mencatat 21 peristiwa kekerasan bersenjata dari Januari hingga Mei 2025, yang mengakibatkan 40 korban, termasuk warga Papua dan non-Papua. Papua menarik perhatian media asing karena dua hal yang saling terkait. Yang pertama adalah posisi geopolitik dan kekayaan alamnya yang strategis untuk menghubungkan Indonesia dengan kawasan Melanesia-Pasifik. Yang kedua adalah sejarah kontroversial Penentuan Pendapat Rakyat 1969, yang terus dijadikan dasar cerita "dekolonisasi" dan "hak penentuan nasib sendiri" oleh pihak non-negara.

2. Pembingkai Media Internasional terhadap Isu Papua

Penelitian ini menggunakan kerangka Robert N. Entman, menemukan bahwa media internasional seperti BBC, Reuters, The Guardian, Al Jazeera, The New York Times, dan Associated Press menggunakan framing kritis terhadap Indonesia secara teratur.

Tabel 1 Media Terkemuka membingkai Isu Ham Di Papua

Media Internasional	Negara/Asal	Framing/Pembingkaian	Sumber
Reuters	Inggris	Menyoroti isu Papua sebagai masalah sosial, diskriminasi, dan kekerasan oleh pemerintah Indonesia	<i>Framing of Papua Under Two Different Medias: Tirto.id and Reuters of United States</i> (Darmawan, 2019). <i>Framing of Online Media News about Riots in Papua (Studies on www.detik.com and www.reuters.com in 2019).</i> (Widyaningsih, 2020).
The New York Times	Amerika Serikat	Diskriminasi rasial, marginalisasi ekonomi, dan sosial terhadap masyarakat adat Papua, Termasuk pembunuhan	“ <i>Indonesia Sends Police to Restive Region After Racial Slurs Ignite Protests</i> ” (Richard C. Paddock

		di luar proses hukum, penyiksaan, penghilangan paksa Pembatasan Kebebasan Pers.	& Muktita Suhartono., 2019).
The Guardian	Inggris	Memiliki liputan yang cukup kritis dan mendalam, sering menyertakan perspektif HAM dan perspektif masyarakat setempat. Misalnya artikel tentang pemboikotan produk karena dugaan ecocide di Papua.	<i>Protesters set fire to parliament building in West Papua as tensions mount.</i> (Ben Doherty, 2019). <i>West Papuan Indigenous people call for KitKat boycott over alleged ecocide</i> (Gayle., 2025).
Al Jazeera	Qatar-Timur Tengah	Rasisme, Kekerasan aparat, kematian aktivis, penyiksaan.	<i>“Fiery protests erupt in Indonesia’s West Papua region”</i> (Febriana Firdaus, 2019). <i>The Internationalization of “West Papua” Issue</i>

			<i>and Its Impact on Indonesia's Policy to the South Pacific Region</i> (Floranesia Lantang, 2021).
BBC	Inggris/Eropa	Isu Rasial, Isu Pelanggaran Ham dan isu lainnya	BBC. 2019. <i>Papua protests: Racist taunts open deep wounds.</i> Kelly Ng. 2023. BBC. <i>Jokowi acknowledges Indonesia's past human rights violations.</i>

Bingkai dominan yang muncul adalah Framing Kekerasan Negara. Bingkai ini menonjolkan operasi militer, pembunuhan di luar hukum, dan kekerasan aparat, tetapi tidak menyebutkan kekerasan KKB terhadap sipil dan aparat. Framing Diskriminasi dan Rasisme. Menghubungkan peristiwa Surabaya 2019 dengan cerita tentang marginalisasi struktural masyarakat Melanesia. Framing Dekolonisasi: Melibatkan Papua dalam diskusi tentang hak untuk menentukan nasib sendiri dan mengecam proses integrasi 1969.

Framing Pembatasan Kebebasan, Menggambarkan deportasi jurnalis asing serta keterbatasan akses media sebagai bukti "penutupan informasi" Media internasional sangat bergantung pada sumber sekunder seperti aktivis diaspora dan laporan Amnesty International dan Human Rights Watch. Mereka juga dapat mendapatkan kesaksian melalui platform digital seperti kanal YouTube *World Council of Churches* dan *Amnesty*.

Ketergantungan ini memperkuat dominasi narasi kritis, sementara narasi pemerintah yang berkaitan dengan keamanan dan pembangunan mendapat liputan yang lebih sedikit. Sebuah analisis yang menggunakan Model Propaganda Chomsky-Herman menunjukkan bahwa operasi melalui dua filter utama: Flak, yang berasal dari tekanan LSM dan parlemen asing terhadap media untuk menentang HAM dan Ideology, yang berasal dari pembentukan "musuh bersama" dengan menggambarkan Indonesia sebagai negara okupasi atau militer. Metode yang digunakan termasuk *stacking card* atau seleksi data, dramatisasi dengan menggunakan kata-kata seperti "genosida", "okupasi", dan "krisis kemanusiaan", dan delegitimasi dengan menempatkan kekerasan KKB sebagai perlawanan.

3. Pengaruh Framing pada Persepsi dan Diplomati Internasional

Framing media menghasilkan tiga dampak berlapis, (1) Pembentukan Opini Publik Internasional, Orang-orang di seluruh dunia, terutama mereka di Barat dan Pasifik, cenderung menyukai Papua meskipun mereka hanya tahu sedikit tentangnya. Fakta bahwa Papua adalah "negara terjajah" dan bukanlah wilayah NKRI adalah salah satu contoh fakta bahwa informasi yang diterima sering terfragmentasi. (2) Tekanan Normatif dan Politik, Pendapat publik memengaruhi institusi internasional. OHCHR, Parlemen Eropa, dan Parlemen Internasional untuk Papua Barat mengeluarkan pernyataan yang sangat penting. Di Majelis Umum PBB, negara-negara Pasifik seperti Vanuatu sering mengangkat masalah Papua. (3) Respons diplomatik Indonesia, Pemerintah menanggapi dengan bantahan di forum PBB, diplomasi publik non-konfrontatif, diplomasi budaya, dan bantuan ke Pasifik. Namun, pembatasan akses jurnalis asing justru memperlebar jarak narasi karena media asing semakin bergantung pada sumber alternatif yang penting.

Secara teoretis, temuan ini menguatkan perspektif konstruktivisme, media bukan cermin pasif, melainkan agen yang mengonstruksi realitas sosial melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam hubungan internasional, konstruksi media ikut membentuk legitimasi negara dan agenda kebijakan luar negeri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan media internasional mengenai pelanggaran HAM di Papua merupakan konstruksi sosial yang disengaja, bukan cerminan netral dari realitas lapangan. Melalui mekanisme framing Entman dan Model Propaganda Chomsky-Herman, media utama seperti *BBC*, *Reuters*, *The Guardian*, dan *Al Jazeera* secara konsisten memproduksi narasi yang menonjolkan kekerasan aparat, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan, serta mengaitkannya dengan wacana dekolonisasi. Konstruksi narasi ini berdampak signifikan: membentuk opini publik internasional yang simpatik terhadap Papua, memicu tekanan normatif dari PBB dan negara-negara Pasifik, serta menciptakan tantangan reputasi dan diplomasi bagi Indonesia.

Keterbatasan akses jurnalis ke Papua memperkuat dominasi narasi kritis dari LSM dan aktivis diaspora, sementara narasi pemerintah kurang terekspos. Dengan demikian, media internasional berperan sebagai aktor konstruksi sosial yang memengaruhi legitimasi negara dan dinamika politik luar negeri.

Untuk mereduksi kesenjangan narasi, penelitian merekomendasikan peningkatan transparansi dan akses informasi, penguatan mekanisme HAM yang kredibel dan independen, serta strategi komunikasi publik yang empatik dan berbasis data. Tanpa langkah tersebut, dikotomi narasi antara pemerintah Indonesia dan komunitas internasional diprediksi akan terus berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ben Doherty. (2019). *Protesters set fire to parliament building in West Papua as tensions mount*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2019/aug/19/protesters-set-fire-to-parliament-building-in-west-papua-as-tensions-mount>
- Darmawan, A. R. (2019). Framing of Papua Under Two Different Medias: Tirto.id and Reuters of United States. *Deskripsi Bahasa*, Vol. 2 No. (2), 91–100. <https://doi.org/10.22146/db.v2i2.348>
- Dominggus A Mampioer. (2025, February 4). *Human Rights Watch desak Presiden Prabowo hentikan pelanggaran HAM di Papua*. Jubi.Id.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, Vol. 43 No. (4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Febriana Firdaus. (2019). “Fiery protests erupt in Indonesia’s West Papua region.” *Al Jazeera*.
- Floranesia Lantang. (2021). The internationalization of «west papua» issue and its impact on Indonesia’s policy to the south pacific region. *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 8 No. (1), 41–59. <https://doi.org/10.21512/jas.v8i1.6447>
- Gayle., D. (2025). West Papuan Indigenous people call for KitKat boycott over alleged ecocide. *The Guardian*, 1.
- Independen, A. J. (2018). *AJI Kecam Pengusiran Jurnalis dari Papua*. <https://aji.or.id/informasi/aji-kecam-pengusiran-jurnalis-dari-papua>
- Kurnia, F. A., Helmi, S. A., & Rochmanna, S. D. (2021). Konstruksi Media Online Detik.com dan Kompas.com terhadap Vanuatu (Analisis Framing Pemberitaan Vanuatu Pasca Pengangkatan Isu Pelanggaran HAM Papua dalam Sidang Umum PBB ke-75). *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, Vol. 9 No. (1), 29–38.
- Naom Chomsky. (2002). *Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda*.
- PERMITA, S. (2024). *Analisis Framing Pemberitaan Penyanderaan Pilot Susi Air Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Papua Di Republika*.
- Richard C. Paddock & Muktita Suhartono. (2019). *The New York Times “Indonesia Sends Police to Restive Region After Racial Slurs Ignite Protests.”*
- Sudiar & Hidayat. (2019). *Studi Hubungan Internasional (untuk pemula sejarah singkat, konsep-konsep dasar & isu-isu kontemporer*. Mulawarman University Press.
- Sugiyono, Sugiyono, and P. Lestari. (2021). *Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*.
- Wendt. A. (1992). Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics. International Organization. *JSTOR. International Organization*, 46.
- Widyaningsih, S. N. (2020). Framing of Online Media News about Riots in Papua. *Pekommas*, Vol. 5 No. (1), 81–90.